# ABSTRAK

**Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh Di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006-2016**

Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh (RUUPA) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Sebagai efek dari Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang disahkan pada bulan Juli 2006 tersebut sebagai implementasi MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia (RI), pada tahun 2009 Gubernur Irwandi Yusuf menetapkan kembali nama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan sebutan Provinsi Aceh saja.

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui tentang bagaimana model penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006 di Kabupaten Aceh Tamiang, Untuk mengetahui persepsi masyarakat Aceh Tamiang terhadap penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006, Untuk mengetahui dampak penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006 di Aceh Tamiang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan menganalisanya dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber hasil dari pengumpulan data.

Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 telah diterapkan dengan baik oleh pemerintah daerah Aceh Tamiang dengan mensosialisasikan ini dari Undang-Undang Pemerintah Aceh tersebut diberbagai kesempatan yang diadakan oleh pemerintah daerah Aceh Tamiang dengan sejumlah kalangan masyarakat di Aceh Tamiang seperti Kesbangpol dan Linmas, Kecamatan Karang Baru, Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Aceh Tamiang, penerapan undang-undang tersebut telah dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.

Saran dari penulis dalam hal ini adalah agar kiranya pemerintah kabupaten Aceh Tamiang lebih menggalakkan sosialisasi Undang-Undang Pemerintah Aceh No.11 Tahun 2006, dan harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat di kabupaten Aceh Tamiang.


Kata Kunci: Persepsi, masyarakat, UUPA No. 11 Tahun 2006

Langsa10 Januari 2018
Penulis,

**IKA GUSTIAWAN**